

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN GOWA**

RISKA AMELIA MELDA MALIK

Nomor Stambuk : 105640232215



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RISKA AMELIA MELDA MALIK

Nomor Stambuk :105640232215

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Riska Amelia Melda Malik

Nomor Stambuk : 105640232215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Masyar, M.Si


Adnan Ma'ruf, S.sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hf. Irvani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0054/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
4. Hamrun, S.IP., M.Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riska Amelia Melda Malik

Nomor Stambuk : 105640232215

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 Agustus 2019

Yang menyatakan

Riska Amelia Melda Malik

ABSTRAK

Riska Amelia Melda Malik. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Adnan Ma'ruf)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Dimana jenis data terdiri data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang meliputi adanya a) pemeriksaan, dimana pemeriksaan yang dilakukan sudah terkoordinasi dengan baik, b) perbaikan, bentuk perbaikan yang diberikan oleh inspektorat dalam bentuk tindak lanjut dimana inspektorat menyurati sekolah yang melakukan kesalahan untuk datang ke inspektorat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya c) penilaian, dengan adanya kebijakan pemerintah ini terhadap pelaksanaan pendidikan gratis mendatangkan dampak positif bagi masyarakat karena tidak ada lagi pungutan bayar membayar serta dapat meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.

Kata kunci : Pengawasan, Pendidikan Gratis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak kunjung habis , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa” .

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari dengan segala kesadaran dan kerendahan hati bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr.Abdul Mahsyar selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf selaku Pembimbing II, yang telah telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, sumbangan pemikiran, arahan, dan nasehat yang amat berharga sejak awal penulisan proposal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Segenap dosen pengampuh terkhusus kepada Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku Penasehat Akademik (PA) serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Ucapan istimewa yang terdalam dari lubuk hati penulis kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Abd Malik dan Ibu Hj. Andriani, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan berupa moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis dan terima kasih juga atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.
6. Terima kasih juga untuk saudara sedarah penulis Irfan Nursadi Malik, S.IP dan Resky Handayani yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.
7. Teman-teman seperjuangan executive 2015 terkhusus kepada teman kelas Ilmu Pemerintahan F (Baso, Nyampa, Janwar, Rifki, Karmin, Aswar, Syahril, Musakkar, Rahmad, Ikramullah, Fahrur, Fahrudin, Almukram, Syakir ,

Aldiyansyah, Hamza, Risal, Acha, Akbar, Cahya, Ayu, Rahma, Fatma, Pilla, Kiki, Elma, Inna, Ichi, Danti, Vista, Fanny Dan Mhia) yang telah menemani perjuangan dari semester 1 sampai sekarang ini.

8. Sahabat penulis Aset Negara (Nurul Khamisah Rahim, Egha Adiarti Desita Sari Indar, Siska Alvaningsi, Nur Asipa Dewi dan Hildayanti (Rahimullah), serta kepada Sevanshipgirls (Nurkapita, Arfina Yusuf, S.Si, Nurul Insani A.Md., Keb, Lisy Nurul Fadhillah, Nur Aflaha Noviyanti dan Ultapri Nur Maghfirah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih untuk Posko Desa Tamalanrea KKP Angk. 17 (Pak Rusdi, S.Sos dan Bu Emmy, A.Md., Keb selaku Bapak/Ibu posko) yang selalu perhatian serta kepada teman-teman posko (Saha, Cawwi, Nisar, Yustika, Hajar, Kak Risna, Dhinda, Teten dan Sri).

Sehubungan dengan akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Agustus 2019

Riska Amelia Melda Malik

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Persyaratan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konsep Pengawasan.....	9
B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	22
C. Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa	23
D. Kerangka Pikir	24
E. Fokus Penelitian.....	25
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27

D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	32
2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Gowa	35
3. Struktur Organisasi Kabupaten Gowa.....	36
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	38
B. Fungsi Pengawasan Inspektorat Derah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa	44
1. Pemeriksaan	47
2. Perbaikan.....	50
3. Penilaian.....	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 24 (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Aparat Pengawas Interen Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Inspektorat Jenderal Departemen. Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana dengan semestinya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan

tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa, kekayaan alam, sosial, budaya dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang biasa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.

Kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya PNS sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan

pemerintah, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya.

Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.

Urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir semuanya dilaksanakan melalui pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah berdasarkan kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mengingat aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di daerah sedemikian kompleksnya serta memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat, di perlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan pembangunan dalam kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat atasnya.

Pengawasan erat sekali kaitannya, yang artinya harus ada suatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi sehingga tanpa rencana hanya sekedar merab-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai

pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang.

Aturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah bersifat dinamis. Namun, diantara aturan itu ialah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ada pula Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/ program dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maksud pengawasan ini adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi dan termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah pada

kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan masyarakat. Agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah.

Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkemajuan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Hal ini penting, terutama ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (2) berbunyi bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai, serta ayat (4) berbunyi bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan nasional ada dua hal khusus yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% pada APBN dan APBD, kedua UU No. 20 Tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.

Membangun Gowa menuju masyarakat yang maju dan mandiri dengan meneruskan layanan pendidikan gratis yang semakin dimantapkan. Keunikan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendidikan gratis di kabupaten Gowa diinisiasi oleh Bupati yang menjabat pada saat itu lewat Peraturan Pemerintah Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis adalah salah satunya yang melaksanakan program tersebut, yang bukan hanya untuk siswa wajib belajar 9 tahun sebagaimana program nasional juga pada tingkat SMA. Selain itu pemberian subsidi ini bukan hanya sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta dan Madrasah.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Gowa dimana kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai, dimana tidak sesuainya pencairan dana pendidikan gratis antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana uraian diatas, maka peran inspektorat sangat dibutuhkan khususnya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pendidikan gratis yang banyak menimbulkan permasalahan dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, demi

terlaksananya program pemerintah tentang pendidikan gratis di Kabupaten Gowa peran inspektorat lebih menitik beratkan pada pengawasan dinas yang terkait.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Gowa, sehingga penulis mengajukan judul :“**Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya

ilmu tentang kebijakan pendidikan gratis, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai kebijakan pendidikan gratis.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan kabupaten Gowa agar daerah tersebut kedepannya lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintahan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari siapa yang benar dan salah. Tetapi lebih kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Sementara itu menurut Mc Farland (dalam Rossevelt, dkk. 2015), *control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives or policies.* (Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).

Menurut Siagian (dalam Baktiyasal dan Farida. 2017) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Effendi (dalam Nuralam, dkk. 2018), pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Lebih lanjut menurut Reksohadiprodjo (2008), mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Fathoni (2006), mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang

diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Siswandi dan Iman (2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Wursato (dalam Darnisa, dkk 2016) mendefinisikan bahwa pengawasan bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi. Organisasi ini akan mencapai sasarannya apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Manullang (2006) mengemukakan bahwa pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Basuki (2007) pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ unit yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, monitoring, perbaikan dan evaluasi.

Menurut Sule dan Saefullah (2005) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Sarwoto (2010) menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

b. Maksud dan tujuan pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Situmorang dan Juhir (dalam Suparmin, 2016) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali

kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu standar.

Munurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu memperbaiki kearah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Ukas (dalam Baktiyasal dan Farida. 2017) mengemukakan:

1. Mensuplai pengawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari hasil-hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang

berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, menurut Sule dan Saefullah (2005) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

1. Adaptasi lingkungan adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.

3. Meminimumkan biaya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Menurut Siswandi dan Iman (2009) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja actual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah :

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

c. Fungsi-fungsi pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu : Mengamati, memberi penilaian dan memberi perbaikan. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

d. Pentingnya pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitupula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara terbaik.

Disiplin dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melakukan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswandi dan Iman (2009) adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya

bahan baku, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profibilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan. Manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah, didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manajer untuk mendegelasikan wewenang. Bila manajer mendegelasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas dan sebagainya. Yang akhirnya kan merugikan organisasi sendiri. Sebaiknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

e. Pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.

2. Tepat waktu yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomi, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada pegawai yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima pata anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gowa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Inspektorat

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan inspektorat sesuai dengan kemenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan.
- e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan.
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional.

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta sekretariat inspektorat.
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa

Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis, pasal 1 (4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (7) Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

Pendidikan gratis di kabupaten Gowa bertepatan dengan inisiasi pendidikan gratis provinsi. Melihat dari latar belakang kedekatan politik dengan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut bukanlah suatu hal yang kebetulan. Pendidikan gratis 12 tahun di Kabupaten Gowa diinisiasi oleh Bupati yang menjabat pada saat itu Ichsan Yasin Limpo lewat Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa No. 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis. Peraturan tersebut memayungi segala bentuk kebijakan terkait pendidikan gratis yang tidak hanya 9 tahun (SD-SMP) tetapi 12

tahun (SD-SMA). Sehingga sejak tahun tersebut, diberlakukan pendidikan gratis dapat berlaku mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjut atas baik negeri maupun swasta di kabupaten Gowa. Langkah berani pemerintah Kabupaten Gowa tersebut menjadi cikal bakal kebijakan pendidikan gratis 12 tahun yang memiliki nilai tambah dibandingkan pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, gambaran kerangka pikir terkait dengan fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dijabarkan pada: pemeriksaan, perbaikan, dan penilaian. Serta hasil yang ingin dicapai efektivitas penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Dari uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitiannya ialah fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yang terbagi dalam 3 tahap yaitu :

1. Pemeriksaan
2. Perbaikan
3. Penilaian

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Yang menjadi konsep dalam penelitian ini yaitu melalui fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis yang terbagi atas 3 tahap yaitu:

1. Pemeriksaan, dimana inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja di Kabupaten Gowa agar program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kelalaian.
2. Perbaikan, dimana inspektorat memberikan perbaikan terhadap kesalahannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan di masa mendatang di Kabupaten Gowa.
3. Penilaian, dimana masyarakat atau orang tua siswa yang merasakan dampak kebijakan pemerintah memberikan penilaiannya terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang ada di Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan setelah ujian seminar proposal selama kurang lebih 2 bulan yaitu akhir bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, karena Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia yang sudah menerapkan program pendidikan gratis. Lokasi penelitian ini diambil dengan asumsi bahwa kantor tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang bersifat objektif dan menyeluruh serta mendalam.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara obyektif mengenai fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.
2. Tipe penelitian yang di gunakan adalah Fenomenologi. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2008) peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman subyektif dari berbagai

jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang.

C. Sumber Data

Pada hakekatnya dalam sebuah penelitian maka ada metode tata cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan menganalisis sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder menurut Sugiyono (2008):

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

D. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan dengan sengaja yang dianggap mengetahui informasi yang lebih dalam dan dapat menjadi bahan sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti dalam pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap pendidikan gratis di Kabupaten Gowa , mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian ini sehingga data yang akan diperoleh akurat dan akuntabel. Adapun informan dalam penelitian ini ada 6 informan yaitu Kasubag Administrasi dan Umum, Kasubag Perencanaan Kepala sekolah SDI TETEBATU I, dan Kepala Sekolah SDI TETEBATU

serta dari Masyarakat. Dimana ke enam informan ini yang akan di wawancarai peneliti dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam skripsi ini, adapun tabelnya sebagai berikut :

Tabel. Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Hasnah, SE., MM	HS	Kasubag Administrasi dan Umum	1 orang
2.	Ahmad Sofyan, SE., MM	AS	Kasubag Perencanaan	1 orang
3.	Nurliah, S.Pd	NL	Kepala Sekolah SDI TETEBATU I	1 orang
4.	Hamidah Kaiyum, S.Pd	HK	Kepala Sekolah SDI TETEBATU	1 orang
5.	Nurhaedah Dg. Kenna	ND	IRT	1 orang
6.	Hasnita Dg. Kanang	HD	IRT	1 orang
Jumlah				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang autentik, mengenai data penelitian ini penulis mengemukakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008) yaitu:

1. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan yang akan dilakukan di kantor inspektorat daerah Kabupaten Gowa.

2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab tentang fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau data-data, seperti data-data fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap pendidikan gratis di Kabupaten Gowa

F. Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Adapun komponen dalam analisis data:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian data, penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan ,menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (menarik kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

1. Triangulasi

Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tiga triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentumelalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi

partisipatif, wawancara mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

- c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.

2. Mengadakan *membercheck*

Hal ini dilakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data akurat (Sugiyono, 2008).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni hingga juli di instansi Pemerintahan Kabupaten Gowa yakni, di Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan sekolah-sekolah yang mengetahui ataupun berperan langsung terkait mengenai fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Gowa, ataupun yang berperan langsung merasakan dampak berjalannya program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.



Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2018 (BPS)

Kabupaten Gowa adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan, dimana wilayahnya terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan Kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa pada tahun 2017 terdiri dari 18 Kecamatan, 122 Desa dan 45 Kelurahan yang berbatasan dengan 8 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Je'nepono.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Secara Umum Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan temperatur 27,125° celcius dimana dapat ditemui daerah beriklim basah dan kering dengan ketinggian 5-1300 meter diatas permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Tinggi wilayah (meter)
1.	Bontonompo	30,39
2.	Bontonompo Selatan	29,24
3.	Bajeng	60,09
4.	Bajeng Barat	19,04
5.	Pallangga	48,24
6.	Barombong	20,67
7.	Sombaopu	28,09
8.	Bontomarannu	0,13-52,50
9.	Pattallassang	-
10.	Parangloe	35,67-129,99
11.	Manuju	-
12.	Tinggimoncong	6,56-101,59
13.	Tombolo Pao	-

14.	Parigi	-
15.	Bungaya	37,49-94,61
16.	Bontolempangan	-
17.	Tompobulu	2,73-68,64
18.	Biringbulu	-

Sumber : Kabupaten Gowa dalam Angka 2018 (BPS)

2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Gowa

Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah terwujudnya pengawasan yang professional dan responsif dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Makna professional adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawal Visi, Misi dan Program-Program strategis Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021, sedangkan makna Responsif adalah suatu upaya organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gowa, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan serta kelembagaan pengawasan dan tata laksana.

3. Struktur Organisasi Kabupaten Gowa

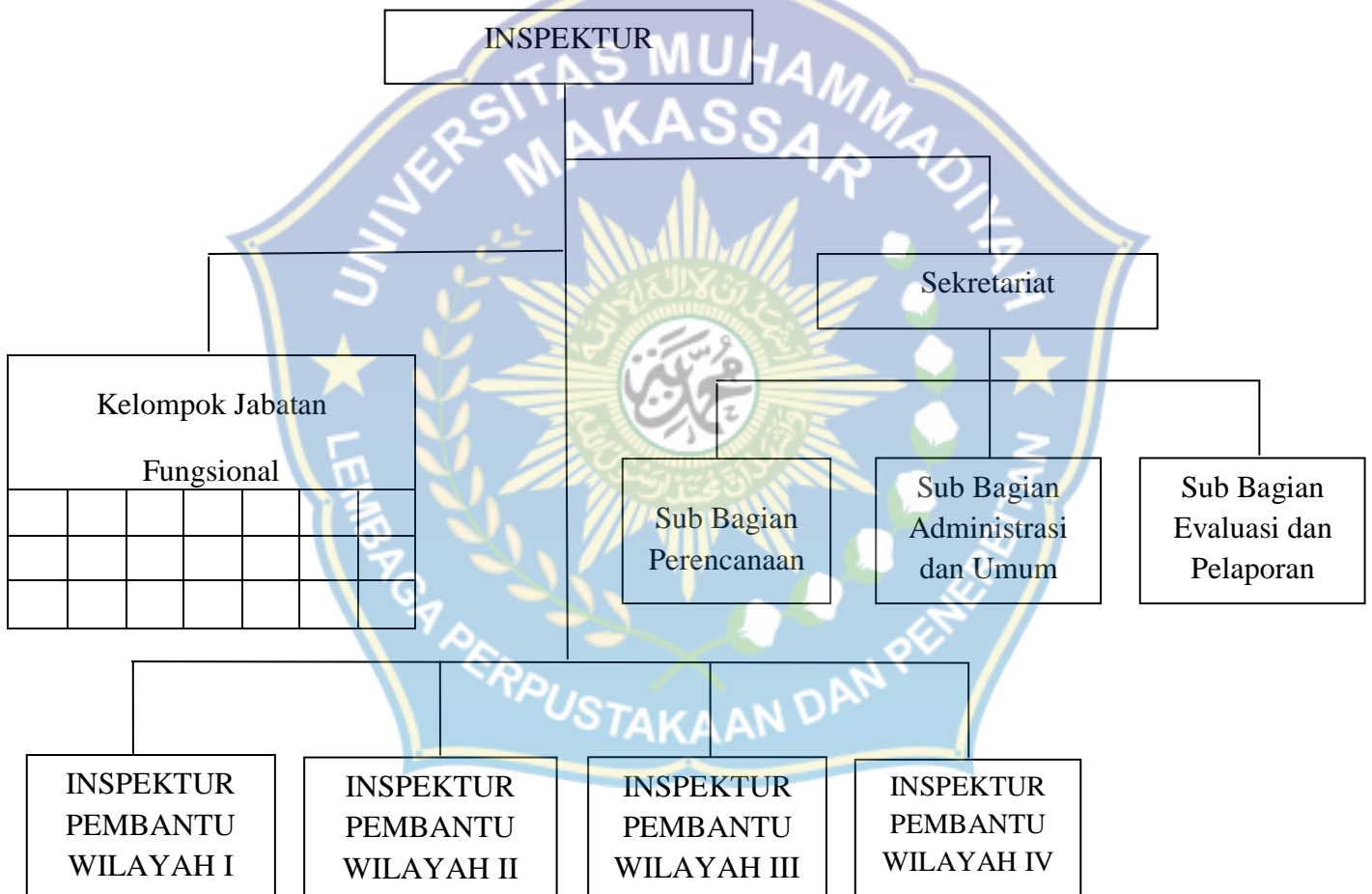
Pada umumnya organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang hubungan kerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara menghubungkan fungsi-fungsi dari suatu badan usaha yang menetapkan hubungan antara pegawai yang melaksanakan tugasnya sehingga struktur organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hubungan kerja yang dibangun, tentunya diperlukan sebuah struktur organisasi untuk kemudian dapat memudahkan alur dan struktur pembagian kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian dalam struktur kepengurusan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu tatanan sistem administrasi yang baik dan sistematis tentunya. Serta jumlah pegawai yang ada di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki 17 orang dan perempuan 14 orang jadi totalnya 31 orang.

Adapun struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA



Sumber : Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Inspektur

Tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Inspektur dirinci sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana program kerja tahunan sesuai skala prioritas.
- 2) Menyusun rencana strategis jangka panjang, pengembangan kapasitas dan profesionalisme dan sumber daya aparat pengawasan.
- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan mengenai pengawasan.
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian.
- 5) Penyelenggaraan mengenai peraturan perundang-undangan pengawasan.
- 6) Penyelenggaraan kesejahteraan bina mental aparat pengawasan.
- 7) Pembinaan dan pengkoordinasian, penyelenggaraan, pemutahiran dan penyajian data hasil pemeriksaan.
- 8) Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain ynag ditugaskan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Fungsi dari Sekretaris Inspektorat dirinci sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengawasan.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek inspektorat.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan.
- 4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja inspektorat.
- 5) Kepegawaian, peralatan umum, dan kerumahtanggaan pada unit inspektorat.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.

c. Kepala sub bagian perencanaan

Tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan dan mengelola data pengawasan.

Fungsi dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dirinci sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3.
- 4) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas.
- 7) Melakukan penyusunan anggaran inspektorat.
- 8) Melakukan penyiapan laporan dan statistik inspektorat.
- 9) Melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- 10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang sehubungan dengan bidang penyusunan perencanaan.

11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.

d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum

Tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga inspektorat.

Fungsi dari Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum dirinci sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3.
- 4) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- 7) Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan.

- 8) Melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan.
- 9) Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.

e. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Fungsi dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dirinci sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3.
 - 4) Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 6) Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
 - 7) Melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 8) Melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan.
 - 9) Melakukan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.
 - 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV

Tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pegaduan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Fungsi dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dirinci sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan penyiapan bahan urusan program pengawasan.
- 2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
- 3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan.
- 5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, penyajian dan perbaikan hasil temuan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan.

g. Jabatan Fungsional

Tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Sumber : Buku RENSTRA Inspektorat Kab. Gowa 2016-2021)

B. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa

Penyelenggaraan pemerintah daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor pemerintahan. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang

direncanakan, dan selain itu dilakukan tindak korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat teralisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana di fokuskan pada daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pengawasan atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan mengacu pada undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No.41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor. Oleh karenanya salah satu yang dilakukan pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Inspektorat Daerah di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan pemeriksaan, dan memberikan perbaikan serta adapun penilaian dari

masyarakat terkait pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.

Pentingnya fungsi dan peran Inspektorat Daerah di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terkait program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, memfokuskan pada pemeriksaan, perbaikan serta penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabuapten Gowa yaitu :

1. Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan dalam bidang keuangan. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam bidang keuangan dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam penggunaan dana pendidikan gratis di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh AS selaku Ketua Sub Bagian Perencanaan, melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa :

“Pelaksanaan pemeriksaan dalam penggunaan dana pendidikan gratis (keuangan) saya rasa selama ini sudah terkoordinasi dengan baik, dimana tim tenaga pemeriksaan sudah menetapkan penyimpangan yang terjadi selama ini. Dimana pemeriksaan yang

dilakukan tim pemeriksa itu 2 kali dalam setahun atau perenam bulan dengan sistem pemeriksaannya itu turun langsung ke lapangan (sekolah) melakukan pemeriksaan dan memeriksa pembukuan (laporan) penggunaan dana pendidikan gratis”.(Hasil wawancara AS, 25 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam penggunaan dana pendidikan gratis sudah terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang sudah terkoordinasi dengan baik karena setiap tenaga pemeriksa (pegawai) sudah menetapkan penyimpangan yang terjadi, dan selain itu sudah adanya pemeriksaan obyektif yang harus dilakukan dalam melakukan pemeriksaan. Dimana penyimpangan tersebut sudah dianalisis lebih lanjut sehingga dapatlah ditemukan ternyata ada penyimpangan yang dilakukan atau tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang ada sebagai dasar acuan dari pelaksanaan pendidikan gratis dalam hal keuangan di Kabupaten Gowa.

Selain itu juga diungkapkan HS selaku, Ketua Sub Bagian Administrasi dan Umum bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan pendidikan gratis yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa pada nyatanya sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih seringkali tidak tepat waktu. Sehingga tidak terlihat fleksibel dengan situasi yang dihadapi. Kadang pemeriksaan tersebut sangat lambat, kadang juga terlalu cepat dilaksanakan sehingga hasil pemeriksaan itu tidak begitu tepat dengan situasi yang seharusnya. Ketidaktepatan waktu tersebut kadang dirasakan pada daerah yang memang jarak tempuhnya sangat jauh dari lokasi Kota di Kabupaten Gowa serta anggaran pengawasan dan SDM pun sangat minim di kantor” (Hasil wawancara dengan HS, 25 Juni 2019).

Adapun pendapat diatas dengan Ketua Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, ternyata dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis seringkali tidak tepat waktu, hal ini sebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan dalam melakukan pengawasan pendidikan gratis. Selain itu, jarak tempuh sekolah juga sangat jauh sehingga harus membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Dengan demikian, bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan sudah fleksibel sebenarnya. Akan tetapi, dalam melakukan pengawasan terhadap pendidikan gratis sangat minimnya anggaran pengawasan dan SDM sehingga sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan.

Adapun yang dikatakan HK selaku Kepala Sekolah SDI TETEBATU bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan tim pemeriksa dari Inspektorat sangat super ketat karena yang diperiksa itu LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dimana didalamnya itu ada list-list harga buku dan alat-alat kegiatan ekstrakurikuler pengeluaran penggunaan dana pendidikan gratis” (Hasil wawancara HK, 27 Juni 2019)

Adapun hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah sangat detail karena ini merupakan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana pendidikan gratis.

Selanjutnya yang diungkapkan informan NL selaku Kepala Sekolah SDI

TETEBATU 1 bahwa:

“Jika kita cepat mengumpulkan data ke daerah lalu dilaporkan ke Inspektorat maka cepat juga dilakukan pemeriksaan terhadap tim pemeriksa dari Inspektorat. Dana pendidikan gratis pun cepat cair”(Hasil wawancara, 28 Juni 2019)

Adapun pendapat diatas bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah cepat dilakukan, jika data juga cepat dikumpulkan. Karena data merupakan acuan dasar dalam melakukan pemeriksaan.

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis sudah terkoordinasi dengan baik karena sudah menetapkan penyimpangan yang terjadi. Akan tetapi, minimnya anggaran pengawasan dan SDM pada kantor Inspektorat Daerah sehingga sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan apalagi jarak sekolah yang begitu jauh dari Kota.

2. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud disini adalah memberikan solusi terhadap kesalahan, yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan gratis.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan gratis selain daripada dilakukannya pemeriksaan, juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan. Oleh karena itu perlu juga ditunjang adanya penilaian dari masyarakat mengenai penerapan pelaksanaan pendidikan

gratis tersebut. Dan dilakukan bentuk perbaikan setelah melakukan pemeriksaan.

Dari hasil wawancara dengan informan AS, selaku Ketua Sub Bagian Perencanaan mengatakan bahwa :

“Bentuk perbaikan yang kami berikan itu dalam bentuk tindak lanjut. Dimana data atau laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pendidikan gratis dari sekolah dikirim ke Pemda dan Pemda yang memberikan surat rekomendasi (saran perbaikan) ke Inspektorat tentang apa kesalahan yang dibuat sekolah tersebut. Lalu memerintahkan Inspektorat untuk menindak lanjutinya. Jika kita menemukan sekolah melakukan kesalahan, maka kami memberikan surat tembusan ke Diknas dan sekolah yang bersangkutan (melakukan kesalahan). Akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwajib atau tergantung dari pimpinan sebenarnya sanksi apa yang diberikan jika melakukan kesalahan yang fatal. Serta sekolah yang diperintahkan ke Inspektorat untuk menyelesaikan kesalahannya.” (Hasil wawancara, 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk perbaikan yang diberikan inspektorat itu dalam bentuk tindak lanjut dan sebenarnya itu tergantung dari pimpinan bagaimana menindak lanjutinya jika ada kesalahan yang fatal dilakukan dalam penggunaan dana pendidikan gratis.

Adapun yang dikatakan oleh informan HK, selaku Kepala Sekolah SDI TETEBATU bahwa :

“Kami melakukan kesalahan dalam penulisan laporan pertanggung jawaban keuangan dana pendidikan gratis saja, semisal harga buku seharusnya hanya 25.000/buah tetapi yang tertulis dilaporan 250.000/buah ini hanya kesalahan dalam penginputan data. Jadi pengawas menyurat kesekolah memberi tahu kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dan memerintahkan ke Inspektorat untuk memperbaiki kesalahan yang kami lakukan” (Hasil wawancara, 27 Juni 2019).

Dari pendapat diatas yang menyatakan bahwa inspektorat memerintahkan sekolah untuk datang ke Inspektorat memperbaiki kesalahan yang kami lakukan dalam laporan pertanggung jawaban dana pendidikan gratis terhadap kesalahan dalam penginputan data tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas bahwa bentuk perbaikan yang diberikan inspektorat itu dalam bentuk tindak lanjut serta menyurati sekolah yang melakukan kesalahan terhadap penggunaan dana gratis untuk memerintahkan datang ke inspektorat untuk ditindak lanjuti.

3. Penilaian

Penilaian yang dimaksud disini adalah proses pengukuran dari pelaksanaan program pendidikan gratis yang nyatanya apakah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan perbaikan oleh inspektorat yang hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan di Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa, pelaksanaan berikutnya adalah penilaian terhadap penerapan pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui terkait penilaian dalam pelaksanaan pendidikan gratis, maka dilakukan wawancara dengan informan HK selaku Kepala Sekolah SDI TETEBATU mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya pendidikan gratis ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dimana dapat dilihat dari segi jumlah peserta didik yang tiap tahunnya semakin meningkat serta adanya pengadaan buku paket, sarana olahraga serta ekstrakurikuler sehingga sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain hingga menjamin adanya mutu

pendidikan. Dan pelaksanaan pendidikan gratis ini sebenarnya belum maksimal, karena dana yang di alokasikan masih terbatas atau belum cukup untuk biaya operasional peserta didik dan sekolah, serta masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa biaya pendidikan gratis ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah” (Hasil wawancara, 27 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa adanya

pendidikan gratis ini sangat menguntungkan bagi sekolah dan peserta didik karena ada dana yang digunakan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.

Senada dengan penjelasan NL selaku, Kepala Sekolah SDI TETEBATU 1 bahwa :

“Adanya pengadaan pendidikan gratis ini, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat lebih ditingkatkan serta meningkatkan kreatifitas guru karena ada dana yang dapat digunakan. Akan tetapi ada kendala yang dialami dalam penyelenggaraan program pendidikan gratis adalah lambatnya pencairan dana atau tidak sesuai waktu pencairan sehingga pembiayaan operasional sekolah dan operasional peserta didik juga terlambat” (Hasil wawancara, 28 Juni 2019).

Adapun penjelasan diatas bahwa penilaian kepala sekolah terhadap pendidikan gratis itu dapat meningkatkan kegiatan yang ada disekolah karena ada dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya. Tetapi kadang juga pencairan dananya terlambat sehingga sekolah mencari pinjaman terlebih dahulu.

Selanjutnya dikemukakan oleh informan ND selaku, masyarakat atau orang tua siswa bahwa :

“Pendidikan gratis ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Dengan kebijakannya ini pemerintah, semua generasi-generasi penerus bisa merasakan duduk dibangku sekolah meskipun banyak yang tergolong keluarga yang tidak mampu. Saya rasa pelaksanaan pendidikan gratis ini dilapangan sangat layak dan berguna untuk perkembangan

generasi-generasi muda, khususnya di Kabupaten Gowa. Dan saya harap kebijakannya ini pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan gratis akan terus berjalan guna meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa di bidang pendidikan.” (Hasil wawancara, 28 Juni 2019).

Adapun hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dengan adanya pengadaan pendidikan gratis ini membawa keuntungan bagi masyarakat yang tidak mampu karena dapat menyekolahkan anak-anaknya serta mengurangi beban hidupnya.

Selain itu juga informan HD selaku, masyarakat atau orang tua siswa mengemukakan bahwa :

“Adanya pendidikan gratis ini, sangat menguntungkan bagi saya selaku orang tua siswa yang merasakan dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan gratis karena tidak ada lagi pungutan biaya bayar membayar kecuali kebutuhan pribadi anak saya seperti pakaian seragam sekolah kami yang membeli sendiri.” (Hasil wawancara 28 Juni 2019).

Adapun pendapat diatas bahwa dengan adanya pendidikan gratis dapat meningkatkan pendapatan orang tua siswa karena tidak ada lagi pungutan biaya bayar membayar.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas bahwa bentuk penilaian terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis ini mendatangkan dampak positif karena dapat mengurangi beban masyarakat karena tidak ada lagi pungutan bayar membayar di sekolah serta dapat meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Inspektorat Daerah di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan pemeriksaan, memberikan perbaikan serta penilaian terkait pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan dari beberapa tahap tersebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis sudah terkoordinasi dengan baik karena sudah menetapkan penyimpangan yang terjadi. Akan tetapi, sangat minimnya anggaran pengawasan dan SDM pada kantor Inspektorat Daerah sehingga sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan apalagi jarak sekolah yang begitu jauh dari Kota. Dimana yang diperiksa itu adalah pembukuan atau laporan pengeluaran penggunaan dana pendidikan gratis. Dan bentuk perbaikan yang diberikan inspektorat itu dalam bentuk tindak lanjut serta menyurati sekolah yang melakukan kesalahan terhadap penggunaan dana gratis untuk memerintahkan datang ke inspektorat untuk ditindak lanjuti. Serta bentuk penilaian masyarakat terhadap penerapan pelaksanaan program pendidikan gratis ini mendatangkan dampak positif karena dapat mengurangi beban

masyarakat karena tidak ada lagi pungutan bayar membayar di sekolah serta dapat meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan dalam pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana pendidikan gratis.
2. Agar terselenggaranya tim pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan di Kabupaten Gowa.
3. Disarankan pula, agar ditambahnya SDM dan anggaran pengawasan dikantor inspektorat daerah Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Gowa dalam Angka 2018*.
<https://gowakab.bps.go.id/publivation/2018/08/16/4de99af84798da40fbb488/kabupaten-gowa-dalam-angka-2018.html> diakses tanggal 15 Juni 2019
- Baktiyasal, Rofli Sulistiyo dan Farida, Lena. 2017. *Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan PT. Mita Aung Swadaya (MAS Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)*.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3813/3046> diakses tanggal 21 Februari 2019
- Basuki, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021
- Darnisa, Madani Muhlis, dan Abdul Mahsyar, 2016. *Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar*.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/viewFile/875/813> di akses tanggal 24 Juni 2019
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen*. Cetakan pertama. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Hendriani, Susi dan Soni A. Nulhaqim. 2008. *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai*.
<http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/4032/2444> diakses tanggal 8 Oktober 2018
- Hidayat, Taufiq. 2018. *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung*.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/download/1304/1148> diakses 13 Maret 2019

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- M, Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi revisi. Cetakan ketujuh. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nuralam, Kadir Adys Abdul, dan Adnan Ma'ruf, 2017. *Pengawasan Pemerintahan Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gowa*.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/viewFile/875/813> diakses tanggal 20 Maret 2019
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi keenam. Cetakan kelima. Penerbit : BPFE. Yogyakarta.
- Rossevelt, Asido Franklin, Domai, Tjahjanulin dan Surwondo. 2015. *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi du DPRD Kota Malang)*.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cetakan keenambelas. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi kedua. Penerbit : Mitra Wicana Media. Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*.
Cetakan keempat. Penerbit: Alfabet. Bandung.

Sule, Erni Trisnawati dan Kurniawan, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Penerbit: Prenada Media. Jakarta.

Suparmin. 2016. *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkatan Penyeberangan Kapal Ferry Tradisional Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*.

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3813/3046> diakses tanggal 15 Maret 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



LAMPIRAN

Foto Bersama Kasubag Administrasi dan Umum



Foto Bersama Kasubag Perencanaan & Kasubag Adminitrasi dan Umum



Foto Bersama Kepala Sekolah SDI TETEBATU



Foto Bersama Kepala Sekolah SDI TETEBATU 1



Foto Bersama Masyarakat





Riwayat Hidup



Peneliti dengan nama lengkap **Riska Amelia Melda Malik** dilahirkan di Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 1997 dari pasangan suami istri, bapak Abd. Malik dan ibu Hj. Andriani. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Allattappampang Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Inpres Tetebatu pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pallangga dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama (2015), peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan yang InSy Allah pada tahun 2019 ini akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1).

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa**”



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1648/05/C.4-VIII/V/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Ramadhan 1440 H
23 May 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1168/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 23 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RISKA AMELIA MELDA MALIK**
No. Stambuk : **10564 02322 15**
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1168/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Um.,m nismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Riska Amelia Melda Malik
Stambuk : 10564 02322 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
Judul Skripsi : **“Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa”**

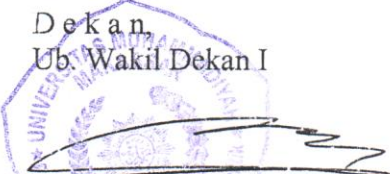
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Mei 2019

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1034 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16848/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1648/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RISKA AMELIA MELDA MALIK**
Nomor Pokok : 10564 02322 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Mei s/d 25 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 27-05-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 29 Mei 2019

Nomor : 070/Ggo /BKB.P/2019
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a
Yth. 1. Ka. Kantor Inspektorat Kab. Gowa
2. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Gowa
Di-
T e m p a t.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 16848/S.01/PTSP/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RISKA AMELIA MELDA MALIK**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 09 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)
Alamat : Jl. Baso Dg Ngawing

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN GOWA**"

Selama : 25 Mei s/d 25 Juni 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

- 1 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
- 2 Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
- 3 Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- 4 Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,


DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peringgal;